

Masalah dan Solusi Patologi Sosial Di Kota Tangerang Selatan*

(Problems and Solutions of Social Pathology in South Tangerang City)

Mujar Ibnu Syarif

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta

E-mail: mujarsyarif@yahoo.com

 [10.15408/sjsbs.v3i2.3655](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.3655)

Abstrak:

Patologi sosial dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen untuk dibersihkan dari tengah kehidupan umat Islam. Adanya beberapa aturan dalam kitab suci al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw yang secara eksplisit mengharamkan umat Islam untuk mendekati zina, mengonsumsi minuman yang memabukan, dan berjudi, sangat jelas membuktikan adanya kepedulian Islam yang begitu tinggi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit sosial dari tengah kehidupan publik.

Kata Kunci: Patologi sosial, Kota Tangerang Selatan, Vaksin Sosial.

Abstract:

Social pathology is seen as something very urgent to be cleaned from the lives of Muslims. The existence of multiple rules in the the Koran and and Hadith that explicitly forbids Muslims to approach adultery, consuming alcoholic beverages, and gamble, clearly proving of the high of Islamic awareness on the need of prevention and control of various of social pathologies from the public life.

Keywords: Patologi sosial, Kota Tangerang Selatan, Vaksin sosial.

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Mei 2016, direvisi: 20 Juli 2016, disetujui untuk terbit: 14 Agustus 2016.

Pendahuluan

Artikel ini secara spesifik membahas tentang patologi sosial atau penyakit kemasyarakatan yang ada di kota Tangerang Selatan dan upaya penanggulangannya. Dalam perspektif Islam, penyakit kemasyarakatan secara teologis dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen untuk dibersihkan dari tengah kehidupan masyarakat. Adanya beberapa ayat dalam kitab suci al-Qur'an yang secara eksplisit mengharamkan umat Islam untuk mendekati zina (QS. al-Isra [17]: 32) dan mengkonsumsi minuman yang memabukan serta berjudi (QS. al-Mâidah [5]: 90), misalnya, sangat jelas membuktikan adanya kepedulian Islam yang begitu tinggi terhadap upaya pencegahan dan pembersihan berbagai penyakit kemasyarakatan dari tengah kehidupan umat Islam.

Tidaklah mengherankan jika secara historis, sosiologis, dan politis, dalam banyak variasinya, upaya pembersihan penyakit kemasyarakatan telah dijalankan di dunia Islam sejak masa klasik Islam di zaman Nabi hingga masa kontemporer ini. Upaya serupa dalam berbagai bentuknya turut pula dilakukan oleh pemerintah dan warga masyarakat Republik Indonesia, baik yang berada di level pemerintah pusat, maupun yang berada pada jajaran pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemerintah dan warga masyarakat yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan.

Senada dengan apa yang dilakukan oleh penguasa dan komunitas muslim di berbagai belahan dunia pada umumnya dan penguasa serta warga masyarakat Kota Tangerang Selatan pada khususnya, banyak pula penguasa dan masyarakat non-muslim di berbagai penjuru dunia yang turut serta mencanangkan gerakan pembersihan penyakit kemasyarakatan.

Persoalannya kemudian, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan penyakit masyarakat, penyakit-penyakit apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, apa saja yang menjadi akar penyebab lahirnya penyakit masyarakat, jenis-jenis penyakit masyarakat apa saja yang kini sudah menggejala di Kota Tangerang Selatan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang bersih dari penyakit masyarakat? Artikel ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang amat fundamental tersebut.

Definisi Penyakit Masyarakat

Secara etimologis, dalam bahasa Arab, menurut 'Abdullâh al-Ja'îtsan, penyakit masyarakat disebut dengan istilah *al-'illah al-ijtimâ'iyah* (العلقة الاجتماعية), yang bentuk pluralnya adalah *al-'ilal al-ijtimâ'iyah* atau *al-maradh al-ijtimâ'i* (المرض الاجتماعي), yang bentuk pluralnya adalah *al-amrâdh al-ijtimâ'iyah* (الأمراض)

الاجتماعية).¹ Sementara menurut Hindun al-Mayzar, penyakit masyarakat disebut dengan istilah *al-musykilah al-ijtimâ'iyah* (المشكلة الاجتماعية) yang bentuk pluralnya adalah *al-musykilât al-ijtimâ'iyah* (المشكلات الاجتماعية), *al-'illah al-ijtimâ'iyah* (علة الاجتماعية), *al-tafakkuk al-ijtimâ'i* (التفكك الاجتماعي), atau *al-sulûk al-munharif* (السلوك المنحرف). Sementara dalam bahasa Inggris, penyakit masyarakat disebut dengan istilah *social pathology, social disorganization, deviant behavior*, atau *social problem*.²

Sementara secara terminologis, terdapat rumusan definisi patologi sosial yang bervariasi. Keragaman definisi ini terutama terjadi karena dua hal. *Pertama*, karena ragam, jenis, dan akar penyebab lahirnya penyakit masyarakat di suatu tempat dan atau di suatu zaman tertentu berbeda dengan yang ada di wilayah atau di masa yang lainnya. *Kedua*, karena subyek, institusi atau lembaga yang memformulasikannya memiliki perspektif yang tidak sama dengan institusi yang lainnya, atau dapat pula karena orang yang mendefinisikannya memiliki latar belakang akademik, fokus pandangan, dan atau kecenderungan yang berbeda. Sebagai contoh saja, berikut ini dikemukakan tujuh buah definisi penyakit masyarakat yang formulasinya berbeda antara satu dari yang lainnya.

Pertama, menurut Hindun al-Mayzar, definisi penyakit masyarakat adalah sebagai berikut: “Penyakit masyarakat berarti penyimpangan yang terjadi akibat tidak ditaatinya hukum yang lurus yang telah ditetapkan sebagai pengatur dalam penataan (kehidupan) masyarakat.”³

Kedua, menurut Merriam Webster Online Dictionary, penyakit masyarakat atau patologi sosial berarti: *a study of social problems (as crime or alcoholism) that views them as diseased conditions of the social organism*⁴ (Sebuah studi tentang masalah-masalah sosial seperti tindak kejahatan atau keadaan sakit karena terlampau banyak mengonsumsi minuman beralkohol) yang menilai contoh-contoh tersebut sebagai kondisi dari sebuah organisme sosial yang sakit.

Ketiga, menurut Kartini Kartono, penyakit masyarakat diartikan sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, moral dan hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, dan hukum formal yang berlaku dalam sebuah negara.⁵

Keempat, menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010, penyakit masyarakat berarti: Perbuatan/tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,

¹Abdullâh al-Ja'itsan, “al-Manzhûmah al-Mutakâmilah Taqdihî 'alâ al-Zhawâhir al-Khathîrah”, <http://www.alriyadh.com>, diakses 12 Mei 2013

²Hindun al-Mayzar, *Jam'u Muqarrar Musykilât Ijtimâ'iyah, Jâ'mi'ah Malik Sa'ûd*, h. 10

³Hindun al-Mayzar, *Ibid*, h. 10.

⁴<http://www.merriam-webster.com>, diakses pada tanggal 12 Mei 2013

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 11

yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma, dan adat istiadat yang berlaku.⁶

Kelima, menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Pelawan Nomor 03 Tahun 2003, penyakit masyarakat berarti: Hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan.⁷

Keenam, menurut Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009, penyakit masyarakat berarti: Suatu perbuatan/tindakan seseorang, sekelompok orang, dan atau badan hukum yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, nilai-nilai Pancasila, dan juga dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Ketujuh, menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006, penyakit masyarakat berarti: Setiap perbuatan orang atau badan hukum yang bertentangan dengan hukum dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁹

Dari uraian di atas dapat digarisbawahi, penyakit sosial atau patologi sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dua hal, yakni : (1) Suatu perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, nilai-nilai Pancasila, dan juga dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat yang semestinya dijunjung tinggi. (2) Sebuah disiplin ilmu yang secara spesifik membahas tentang faktor-faktor dan masalah-masalah yang dapat mengakibatkan munculnya penyakit sosial.

Jenis-Jenis Penyakit Masyarakat

Sama halnya seperti definisi penyakit masyarakat, mengenai jenis-jenis penyakit masyarakat pun di kalangan para ahli patologi sosial terjadi perbedaan pendapat. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mohammad Nuh, ada tiga penyakit sosial yang sangat besar dampak negatifnya

⁶Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan penindakan Penyakit Masyarakat.

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat.

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat.

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

yaitu: (1) kemiskinan; (2) ketidaktahuan, dan (3) keterbelakangan peradaban.¹⁰ Sementara Menurut James Lewis, penyakit sosial meliputi empat hal, yakni: (1) kecanduan heroin dan alkohol, (2) melahirkan anak luar nikah, (3) tindak kekerasan di sekolah, dan (4) kemiskinan struktural.¹¹ Sedangkan menurut Achmad M Akung, penyakit masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu: (1) gratifikasi seks atau jasa layanan seksual dari seorang perempuan yang disubordinasikan sebagai umpan dan penggoda pria yang sedang memegang jabatan tertentu, agar dalam lingkup jabatannya itu ia bersedia melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi gratifikasi seks, (2) pelacuran (prostitusi), dan (3) korupsi.¹²

Melengkapi pendapat tersebut, Musfi Yendra menyatakan, penyakit masyarakat dapat dipetakan ke dalam 10 jenis, yakni: (1) perkelahian atau tawuran antar pelajar, yang biasanya melibatkan geng, termasuk di antaranya geng pelajar perempuan yang belakangan ini cukup marak bermunculan, (2) penodongan, (3) perkosaan, (4) mutilasi, (5) penipuan, (6) demonstrasi yang mematikan, (7) prostitusi, (8) perdagangan manusia, (9) perjudian, (10) *illegal logging*, dan (11) kejahatan politik dalam bentuk penipuan terhadap rakyat oleh oknum elit politik tertentu dengan berbagai bentuk janji politik yang disampaikannya pada saat kampanye menjelang pemilu, yang kemudian dikhianatinya setelah ia berhasil menggapai jabatan politik yang diinginkannya.¹³

Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Pasal 4 Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, penyakit masyarakat meliputi: (1) minuman keras, (2) pelacuran dan, (3) perzinaan. Sementara menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pelawan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat, penyakit masyarakat meliputi perbuatan dan tindakan perilaku: (1) prostitusi, (2) homoseks, (3) lesbian, (4) sodomi, (5) penyimpangan seksual lainnya, (6) minuman keras, (7) gelandangan dan pengemis, dan (8) waria. Sedangkan menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat, penyakit masyarakat meliputi: (1) minuman yang dapat memabukan (beralkohol), (2) perbuatan cabul, yang berarti perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan oleh sesama orang dewasa yang berlainan jenis

¹⁰ Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2013, Kamis, 2 Mei 2013, lihat kemdikbud.go.id, diakses 12 Mei 2013

¹¹James Lewis, *Obama Flunks on Social Pathology*, <http://www.americanthinker.com>

¹² Ahmad M Akung, "Patologi Sosial Grafatika Seks", lihat <http://gagasanhukum.wordpress.com>, diakses 12 Mei 2013

¹³Musfi Yendra, "Genk Perempuan dari Trend ke Patologi Sosial", lihat <http://padang-today.com>, diakses 12 Mei 2013

dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya, (3) pelacuran (prostitusi), yang berarti praktek pelacuran atau perbuatan persepualahan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa melalui perkawinan yang sah, (4) porno aksi, yang berarti perbuatan atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi yang secara langsung dapat dilihat oleh publik secara umum, (5) hiburan *band* dan organ tunggal, yang berarti hiburan yang menggunakan alat musik dengan penyanyi atau artis di tempat umum yang dilaksanakan dalam rangka acara tertentu; (6) premanisme, yang berarti suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Akar Penyebab Lahirnya Penyakit Masyarakat

Paling sedikit ada tiga hal utama yang menjadi akar atau penyebab lahirnya penyakit masyarakat, yaitu: (1) Faktor ekonomi. Penyakit masyarakat yang timbul karena faktor ekonomi antara lain adalah kemiskinan dan pengangguran, (2) faktor budaya. Penyakit masyarakat yang muncul lantaran faktor budaya ini, antara lain, ialah kenakalan remaja, dan (3) faktor psikologis. Contoh penyakit masyarakat yang kemunculannya dipicu oleh faktor yang disebut terakhir ini adalah aliran sesat.¹⁴

Penyakit Masyarakat dalam Konteks Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data-data yang dilansir berbagai media, paling kurang, ada 9 (sembilan) jenis penyakit masyarakat yang saat ini sudah menggejala di kota Tangerang Selatan. Kesembilan jenis penyakit masyarakat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama; Terorisme. Penyakit masyarakat ini, terutama baru disadari eksistensinya setelah adanya oknum masyarakat di Pamulang, yakni Muhammad Jibril yang ditangkap polisi karena diduga terlibat jaringan teroris. Selanjutnya, kesadaran masyarakat Kota Tangerang Selatan akan adanya terorisme semakin bertambah kuat setelah adanya oknum mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, yakni Syaifuddin Zuhri alias Ustadz SJ dan M Syahrir yang ditangkap Densus 88 di sebuah rumah kontrakan di jalan semanggi II, Ciputat, karena diduga merupakan dua orang aktor pelaku terror Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton.¹⁵

¹⁴<http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/11/masalah-sosial-523482.html>, diakses 12 Mei 2013

¹⁵<http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/28/benarkah-uin-jakarta-sarang-teroris-359316.html>

Kedua; Narkoba dan seks bebas. Penyakit ini diketahui pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan setelah terungkapnya data dari rumah sakit maupun puskesmas yang menyebutkan ada sekitar 64 orang warga Tangerang Selatan yang terjangkit penyakit HIV/AIDS yang diduga tertular HIV/AIDS melalui konsumsi narkoba dengan menggunakan jarum suntik yang sudah terkontaminasi virus HIV/AIDS atau karena melakukan praktek seks bebas.¹⁶

Ketiga; Minuman keras (miras). Peredaran miras di Kota Tangerang Selatan sudah semakin tidak terkontrol dan kian membahayakan generasi muda di kota Tangerang Selatan yang memiliki motto “cerdas, modern dan religious”. Sebagai contohnya, menurut penuturan Mahfud, warga Jalan Kertamukti, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, tidak adanya kontrol yang ketat dari pemerintah membuat minuman keras beredar sampai ke toko-toko kecil. Biasanya, lanjut Mahfud, setiap Sabtu malam banyak anak muda yang sengaja berkumpul di pinggir jalan sambil mengonsumsi minuman keras, khususnya di Jalan Kertamukti, Pisangan, Ciputat. Pernyataan senada, disampaikan juga oleh Ruslan, yang adalah juga warga Kertamukti, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur. Menurutnya, lantaran akses untuk mendapatkan minuman keras sangat mudah di Kota Tangerang Selatan, maka setiap Sabtu malam banyak anak-anak muda yang sengaja berkumpul di pinggir jalan sambil menyekal botol minuman keras berbagai merek.¹⁷

Keempat; Gelandangan dan pengemis (gepeng), orang terlantar, dan waria. Adanya kelompok ini diakui Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan yang secara estafet sering melakukan Razia dan bahkan tak jarang pula terlibat kejar-kejaran dengan mereka di sejumlah ruas jalan di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Ciputat dan Serpong, karena mereka dianggap mengganggu ketertiban umum.¹⁸ Menurut data yang dikeluarkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), pada bulan Juni 2012 saja, pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang ada di Kota Tangerang Selatan berjumlah sebanyak 1.055 orang. Dari angka tersebut yang terdata di antaranya 47 orang gelandangan, 100 orang pengemis, 118 orang eks narapidana, 36 orang anak yang terlibat dengan kasus hukum, 215 orang pecandu Napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya), 326 orang penderita HIV/AIDS, dan 163 orang anak jalanan.¹⁹

Kelima; Prostitusi yang dijalankan oleh Pekerja Seks Komersil (PSK). Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, menurut mantan kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan, H. Sukanta, hampir seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan terdapat titik-titik yang biasa

¹⁶ <http://www.poskota.co.id> diakses 13 Mei 2013

¹⁷<http://kabartangsel.com/2013/02/mendesak-perda-tentang-pembatasan-miras-di-tangsel/>

¹⁸<http://geraibanten.com/puluhan-gepeng-waria-terjaring-razia-satpol-pp-tangsel>

¹⁹<http://globaltangsel.com/baca/332/jelang-ramadhan-tangsel-dibanjiri-pengemis/>

dimanfaatkan para Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk mangkal guna menjaring pria hidung belang. Misalnya di Pondok Aren, lokasi yang biasa dipakai mangkal adalah Tegal Rotan, kemudian di Ciputat yang biasa dijadikan lokasi mangkal adalah Serua. Demikian pula di Ciputat Timur. Untuk wilayah yang disebut terakhir, lokasi mangkal paling favorit yang menjadi pilihan para Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah di wilayah Cimanggis. Kemudian di Serpong Utara dan Setu, lanjut Sukanta, ada juga lokasi yang sering dijadikan pangkalan PSK. Jika ditotal, tegas Sukanta, ada sekitar 28 titik yang rawan jadi tempat mangkal Pekerja Seks Komersil (PSK).²⁰

Keenam; Korupsi. Jenis penyakit ini mulai diketahui keberadaannya, terutama setelah Petugas Kejaksaan Negeri Tigaraksa Tangerang menangkap tersangka kasus dugaan korupsi, Tatang Sago. Ia diduga terlibat kasus korupsi pengadaan alat berat (*wheel loader*) pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan senilai Rp 650 juta yang alokasi dananya bersumber dari APBD tahun 2009.²¹

Ketujuh; Pengangguran. Menurut Pitri Yandri, Peneliti Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PSDOD) STIE Ahmad Dahlan Jakarta, pengangguran di Tangerang Selatan (Tangsel) meningkat dari 9.605 orang pada tahun 2010, menjadi 50.122 orang atau meningkat sekitar 40 ribu orang selama tahun 2011. Angka ini hampir mencapai 4 persen dari keseluruhan jumlah penduduk kota Tangerang Selatan.²²

Kedelapan; Kemiskinan, buta huruf, dan buta hukum. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan, saat ini jumlah masyarakat miskin, buta huruf, dan atau buta hukum di Tangerang Selatan mencapai 200 ribu jiwa dari total sekitar 1,3 juta penduduk.²³

Kesembilan; Aliran Sesat. Data mengenai adanya aliran sesat di Kota Tangerang Selatan, antara lain, diketahui lewat laporan dua orang jama'ah wanita yang mengaku menjadi korban ajaran aliran sesat kepada MUI Kecamatan serpong Utara pada paruh terakhir tahun 2009. Menurut pelapor yang menyampaikan kesaksiannya di kelurahan Pakujaya, dari pengajian yang kerap diikutinya di Puri Pakujaya dan Pondok Jagung Timur, mereka didoktrin mengenai tidak perlunya shalat. Selain itu, pergi haji juga tidak perlu jauh-jauh ke Mekkah. Akan tetapi, ibadah haji sudah dianggap cukup memadai jika para jamaah datang ke rumah sang guru dalam bentuk konvoi dengan menggunakan mobil dan atau sepeda motor untuk kemudian menyerahkan sejumlah uang

²⁰ <http://m.tangerangnews.com/baca/2012/07/31/7676/satpol-pp-tangsel-gencar-razia-pekak->

²¹<http://inpekorjak.wordpress.com/2011/07/18/tersangka-korupsi-alat-berat-tangerang-selatan-ditangkap-kejari-tigaraksa/>

²² <http://metrotangsel.com/wooww-76-persen-lahan-di-tangsel-dikuasai-pengembang/>

²³<http://www.rmol.co/read/2012/04/24/61690/200-Ribu-Orang-Tangerang-Selatan-Positif-Buta-Hukum->

kepada sang guru sebagai pengganti ongkos naik haji (ONH). Kejanggalan lain, menurut penuturan pelapor, sang guru sering membujuk jamaah wanitanya untuk dipoligami, kendatipun ada di antaranya yang masih memiliki suami. Dalam realitanya, lanjut pelapor, ada di antara jamaah wanita yang berdomisili di Tangerang Selatan yang secara paksa direbut dari suaminya dan kemudian diperistri sang guru yang kemudian baru mereka sadari bahwa sang guru dimaksud mengajarkan paham sesat.²⁴

Solusi Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Tangerang Selatan

Dalam rangka mewujudkan kota Tangerang Selatan yang bersih, tidak ternoda, atau tidak terkontaminasi berbagai penyakit masyarakat, maka segenap jajaran pemerintah kota Tangerang Selatan harus berusaha sekuat daya dan upaya dengan bersinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan organisasi kepemudaan se-Kota Tangerang Selatan untuk memberantas secara tuntas berbagai jenis penyakit masyarakat yang sudah mulai menggejala di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dielaborasi di muka pada khususnya, dan berbagai jenis penyakit masyarakat lain pada umumnya.

Khusus untuk penyakit masyarakat berupa korupsi, maka jika sungguh-sungguh serius ingin mewujudkan kota Tangerang Selatan yang benar-benar bersih dari penyakit masyarakat yang disebut terakhir ini, maka semua elite politik Kota Tangerang Selatan, mulai dari walikota dan seterusnya, harus menjadi suri tauladan dalam hal kebersihan diri dari tindakan korupsi. Dalam kaitannya dengan perang melawan korupsi, maka harus betul-betul dipertahankan konsistensi antara kata dan perbuatan. Karena itu, jika secara terbuka, seorang politisi sudah menyatakan "Jangan korupsi", maka tentu ia tidak hanya pandai menyatakan larangan semacam itu, tapi ia juga pasti akan membuktikannya dalam tindakan nyata, yakni dengan tidak pernah mau melakukan korupsi, sekalipun peluang korupsi terbuka lebar baginya.

Dalam kaitan ini, maka bila ingin menegakkan supremasi hukum dan memberantas penyakit masyarakat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sudah menjadi penyakit yang membudaya dan melembaga (*institutionalized*), bahkan sudah menjadi *way of life*, dan dilakukan oleh para pejabat negara di semua lini, dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling rendah, maka harus dimulai dari para politisinya.

Bila ingin memberantas penyakit masyarakat dalam bentuk korupsi, maka perlu diteladani mekanisme pemberantasan korupsi yang diajarkan Nabi Muhammad saw, yakni harus dimulai dari pucuk piramida (*from the top of the pyramid*). Contoh dimaksud terlihat secara gamblang sewaktu Usâmah Ibn Zaîd

²⁴ Wawancara dengan dua orang pelapor yang mengaku korban aliran sesat, Pakujaya, Desember 2009

yang mendapat mandat dari para pemimpin Qura'isy menemui Nabi Muhammad saw guna melakukan *lobby* supaya beliau bersedia membatalkan hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian, yakni Fatimah binti al-Aswad, salah seorang wanita terpandang berdarah Qura'isy yang berasal dari kabilah al-Mahzhûmiyyah. Sebagai respon atas permohonan tersebut, dengan sangat tegas Nabi Muhammad saw bersabda sebagai berikut:

“Sesungguhnya yang menjadi penyebab kehancuran manusia sebelum kalian adalah lantaran jika ada seseorang yang berasal dari keluarga terpandang di antara mereka melakukan pencurian, maka mereka tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Sebaliknya, jika yang melakukan pencurian bukan berasal dari kalangan keluarga terpandang di antara mereka, maka mereka segera menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggam tangan-Nya, seandainya Fâtimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya aku akan memotong tangannya”. (HR. Bukhari).²⁵

Dalam konteks kota Tangerang Selatan, maka pemberantasan korupsi harus dimulai dari walikota. Bila dalam suatu negara, korupsi sudah menjadi sebuah penyakit kronis, maka siapa pun yang dipercaya rakyat untuk menjadi walikota, dan atau bahkan dipercaya rakyat untuk menjadi presiden, maka ia harus memiliki visi, komitmen, dan keberanian yang memadai untuk melakukan tindakan keras (*crack down*) terhadap para pelaku korupsi dan berani mengambil resiko (*risk taker*) untuk dilawan barisan kaum korup serta resiko dilawan preman dan para mafioso.

Dengan kata lain, perbaikan kerusakan mental para pejabat yang sudah sedemikian parah, harus dimulai dari pucuk piramida. Kalau walikota selaku pimpinan puncak di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat memberikan contoh yang konsisten, maka bagian-bagian piramida yang di bawahnya, diduga kuat, akan mengikutinya. Tetapi, kalau politisi yang berada di puncak piramida masih gamang dan komitmennya kurang jelas untuk merevolusi mental yang sempat rusak, maka pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, jelas akan nampak seperti berjalan di sebuah terowongan yang gelap dan panjang atau masih sangat sulit diwujudkan.

Karena itu, keteladanan harus dimulai dari atas, yakni dari walikota. Alasannya sederhana, masyarakat dalam sebuah negara pada umumnya masih feodalistis. Hal ini relevan dengan pepatah Indonesia, guru kencing berdiri murid kencing berlari atau bahkan menari-nari atau dalam pepatah inggris *the fish rots from the head* (ikan membusuk dari kepalanya) masih sangat relevan. Para pemimpin di tiap-tiap eselon harus menjadi kaca benggala. Kalau walikota sebagai top elite politik di kota Tangerang Selatan yang berada di pucuk piramida tidak merasa risih atau tidak punya rasa malu untuk melakukan korupsi, misalnya niscaya para pejabat yang berada pada level bawahnya persis

²⁵Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadits no. 3965, (t.tp: tp., t. th), jilid 13, h. 201

sama akan menirunya dengan cara yang lebih kreatif. Sebaliknya, jika Walikota Tangerang Selatan mampu bersikap bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, niscaya bawahan dan rakyatnya pun akan berusaha melakukan hal yang sama.

Sehubungan dengan hal ini, pakar kepemimpinan John C. Maxwell dalam *The Power of Leadership* menyatakan sebagai berikut:

"The most effective leadership is by example, not edict. Ninety percent of people learn visually, nine percent verbally, and one percent of the rest with other senses"(Kepemimpinan yang paling efektif adalah yang mampu memberikan contoh dalam perbuatan nyata, bukan hanya sekedar retorika. Sembilan puluh persen manusia belajar secara visual, sembilan persen secara verbal, dan satu persen sisanya dengan indera lainnya).²⁶

Berdasarkan pendapat Maxwell tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata seseorang lebih banyak belajar dengan cara mengikuti apa yang dilihatnya. Karena itu, kredibilitas seorang pemimpin hanya dapat diakui dan haknya untuk diikuti rakyatnya adalah tidak lain semata-mata didasarkan pada kemampuannya untuk menampilkan diri sebagai suri tauladan bagi rakyatnya dalam keseharian hidupnya (*a leader's credibility will only be recognized, earning him the right to be obeyed in everyday life, if he has been able to demonstrate exemplary behaviour which deserves to imitated by his people*).

Dalam konteks negara non-muslim, jika ingin berhasil memberantas korupsi, cara Cina dapat dijadikan salah satu teladan yang terbaik. Sewaktu dipimpin perdana menteri Zhu Rongji, Cina mengkampanyekan slogan anti korupsi, memberlakukan hukuman mati bagi koruptor dan berani menantang siapa pun rakyat Cina untuk menembak dirinya di tempat bila dia terbukti melakukan korupsi. Pada pelantikannya sebagai Perdana menteri pada bulan Maret tahun 1998, Zhu Rongji melontarkan pernyataan sebagai berikut "Untuk melenyapkan korupsi, saya menyiapkan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan untuk koruptor, dan satu untuk saya bila saya melakukan perbuatan yang sama". Ungkapan sedemikian sangar yang kemudian menjadi sangat terkenal itu kemudian diulang-ulang selama beberapa bulan, lewat koran dan televisi. Hal ini merupakan bagian dari kampanye pemerintah Cina untuk memberantas korupsi dari negeri Cina yang kala itu merupakan negara yang berada pada gugus teratas negara paling korup di dunia.²⁷

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2002, Zhu Rongji membuktikan kata-katanya. Hari itu, pengadilan Beijing menjatuhkan hukuman mati bagi Hu Changqing, mantan wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, karena terbukti menerima suap sebesar 660.000 dollar AS atau sekitar 5,2 miliar rupiah dari pengusaha. Itu hanyalah satu di antara 4300 orang Cina yang telah

²⁶<http://chitoryu.com/leadership.htm>, diakses 2 Desember 2010

²⁷Mujar Ibnu Syarif, "Contemporary Islamic Political Discourse on Political Ethics of The State Officers", artikel yang belum dipublikasi, FSH UIN Jakarta, 2013, h. 22

menjalani eksekusi hukuman mati sampai tahun 2002 karena terbukti korupsi dan melakukan kejahatan lain.

Dampak positif yang dapat dipetik setelah pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas adalah mendukung terciptanya kepastian hukum yang jelas. Sehingga negeri Cina kemudian menjadi tujuan investasi teraman di dunia yang mampu menghimpun dana masuk 50 miliar dollar AS setiap tahunnya. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, Republik Rakyat Cina (RRC) juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, yakni rata-rata di atas tujuh persen pertahun.

Ibarat tubuh, agar masyarakat Kota Tangerang Selatan dapat tahan terhadap berbagai macam penyakit, maka daya imunitasnya haruslah ditingkatkan. Satu di antara upayanya adalah melalui vaksinasi. Selanjutnya, layaknya penyakit fisik, maka setiap jenis penyakit masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan juga perlu dilakukan diagnosa yang tepat sehingga memungkinkan diberikan obat dan terapi yang berbedanya, tepat, dan akurat sesuai dengan jenis penyakit yang ada.

Sebagai contoh saja, untuk tiga jenis penyakit sosial yang sangat besar dampak negatifnya bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu (1) kemiskinan; (2) ketidaktahuan, dan (3) keterbelakangan peradaban, maka cara meningkatkan daya tahan (imunitas) sosial agar terhindar dari ketiga macam penyakit tersebut, meminjam kerangka yang ditawarkan Mohammad Nuh, mantan menteri pendidikan RI, adalah melalui kependidikan. Selain sebagai *vaksin* sosial, pendidikan juga merupakan *elevator* sosial untuk dapat meningkatkan status sosial. Selanjutnya, mengingat akses pendidikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan maka perlu kiranya pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk secara terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak. Dari sisi keterjangkauan pendidikan, pemerintah Kota Tangerang Selatan juga perlu menyiapkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa.²⁸

Dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu merancang program pemberian bantuan modal usaha untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi kaum miskin. Lebih dari itu, regulasi khusus juga perlu disusun untuk mengatur supaya para pebisnis dengan modal besar, semisal para pemilik Alfamart dan Indomart tidak semudah membalikan telapak tangan dalam membangun dan mengelola bisnis dengan modal besar yang berpotensi mematikan usaha para pengusaha kecil dan menengah. Jika

²⁸Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2013, Kamis, 2 Mei 2013, lihat www.kemdikbud.go.id, diakses 12 Mei 2013

dimungkinkan, pemerintah Kota Tangerang Selatan juga perlu menetapkan regulasi yang dapat memaksa para pengelola Alfamart dan Indomart yang belakangan ini tumbuh begitu subur layaknya jamur di musim hujan, untuk mengakomodasi berbagai jenis barang dagangan dan atau kerajinan yang dihasilkan para pengusaha kecil dan menengah untuk dapat dipasarkan di Alfamart, Indomart, Giant, atau sentra-sentra bisnis lainnya yang dimiliki atau dikelola para pebisnis kelap kakap yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk mengatasi pengangguran, pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu menciptakan lapangan kerja baru untuk memberi kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan bagi mereka yang masih menganggur.

Sedangkan untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak mengonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), menjalankan bisnis pelacuran, perjudian, dan lain-lain kegiatan yang tergolong dalam kategori penyakit masyarakat, maka perlu juga dirancang program khusus yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Dengan begitu, diharapkan masyarakat luas dapat menghindarkan diri dari melakukan berbagai tindakan menyimpang yang dilarang agama. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) yang di dalamnya secara khusus diatur mengenai pelarangan, penertiban, dan penanggulangan berbagai jenis penyakit masyarakat, terutama pembatasan peredaran minuman keras (miras), penertiban prostitusi, perjudian, dan lain-lain, agaknya juga perlu disusun, ditetapkan, dan diberlakukan di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Jika kesemua hal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, niscaya visi dan misi yang dicanangkan pemerintah kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang bersih dari berbagai penyakit kemasyarakatan bukan hanya sekedar mimpi. Akan tetapi, akan segera dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Patologi sosial atau penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, nilai-nilai Pancasila, dan juga dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat yang semestinya dijunjung tinggi.
2. Penyakit masyarakat, antara lain meliputi kemiskinan, ketidaktahuan, keterbelakangan peradaban, kecanduan heroin dan alkohol, melahirkan anak luar nikah, kemiskinan, gratifikasi seks, pelacuran (prostitusi), korupsi, perkelahian atau tawuran antar pelajar, perdagangan manusia,

perjudian, homoseks, lesbian, sodomi, gelandangan, pengemis, waria, perbuatan cabul, porno aksi, dan premanisme.

3. Paling sedikit ada tiga hal utama yang menjadi akar atau penyebab lahirnya penyakit masyarakat yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor psikologis.
4. Beberapa jenis penyakit masyarakat yang saat ini sudah menggejala di Kota Tangerang Selatan, antara lain terorisme, narkoba dan seks bebas, minuman keras (miras), gelandangan dan pengemis (gepeng), orang terlantar, waria, prostitusi, korupsi, pengangguran, kemiskinan, buta huruf, buta hukum, dan aliran sesat.
5. Solusi penanggulangan penyakit masyarakat di Kota Tangerang Selatan, antara lain, dapat dilakukan dengan tampilnya semua elite politik Kota Tangerang Selatan, mulai dari walikota dan para pejabat di bawahnya, untuk menjadi suri tauladan dalam hal menjaga kebersihan diri dari berbagai penyakit masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, pemberian bantuan modal usaha, merancang program khusus yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama, menyusun, menetapkan, dan memberlakukan Peraturan daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan yang di dalamnya diatur secara spesifik mengenai pelarangan, penertiban, dan penanggulangan berbagai jenis penyakit masyarakat.

Pustaka Acuan

Al-Qur'an al-Karim

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. hadits no. 3965, t.tp: tp., t. th, jilid 13

Al-Ja'itsan, Abdullâh. *al-Manzhûmah al-Mutakâmilah Taqdhî 'alâ al-Zhawâhir al-Khathîrah*, <http://www.alriyadh.com>, diakses 12 Mei 2013

Al-Mayzar, Hindun. *Jam'u Muqarrar Musykilât ijtima'iyah*, Jâ'mi'ah Malik Sa'ûd, t. th

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan penindakan Penyakit Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada Peringatan Hari
Pendidikan Nasional Tahun 2013, Kamis, 2 Mei 2013, liha
kemdikbud.go.id, diakses 12 Mei 2013.

Wawancara dengan dua orang pelapor yang mengaku korban aliran sesat,
Pakujaya, Desember 2009

Internet

<http://chitoryu.com/leadership.htm>, diakses 2 Desember 2010

<http://www.merriam-webster.com>, diakses pada tanggal 12 Mei 2013

<http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/11/masalah-sosial-523482.html>, diakses
12 Mei 2013

[http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/28/benarkah-uin-jakarta-sarang-teroris-
359316.html](http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/28/benarkah-uin-jakarta-sarang-teroris-359316.html)

<http://www.poskota.co.id> , diakses 13 Mei 2013

[http://kabartangsel.com/2013/02/mendesak-perda-tentang-pembatasan-miras-di-
tangsel/](http://kabartangsel.com/2013/02/mendesak-perda-tentang-pembatasan-miras-di-tangsel/), diakses 13 Mei 2013

<http://geraibanten.com/puluhan-gepeng-waria-terjaring-razia-satpol-pp-tangsel>,
diakses 13 Mei 2013

<http://globaltangsel.com/baca/332/jelang-ramadhan-tangsel-dibanjiri-pengemis/>,
diakses 13 Mei 2013

[http://m.tangerangnews.com/baca/2012/07/31/7676/satpol-pp-tangsel-gencar-
razia--pekat-](http://m.tangerangnews.com/baca/2012/07/31/7676/satpol-pp-tangsel-gencar-razia--pekat-), diakses 13 Mei 2013

[http://inpekorjak.wordpress.com/2011/07/18/tersangka-korupsi-alat-berat-
tangerang-selatan-ditangkap-kejari-tigaraksa/](http://inpekorjak.wordpress.com/2011/07/18/tersangka-korupsi-alat-berat-tangerang-selatan-ditangkap-kejari-tigaraksa/), diakses 13 Mei 2013

[http://metrotangsel.com/wooww-76-persen-lahan-di-tangsel-dikuasai-
pengembang/](http://metrotangsel.com/wooww-76-persen-lahan-di-tangsel-dikuasai-pengembang/) , diakses 13 Mei 2013

[http://www.rmol.co/read/2012/04/24/61690/200-Ribu-Orang-Tangerang-Selatan-
Positif-Buta-Hukum-](http://www.rmol.co/read/2012/04/24/61690/200-Ribu-Orang-Tangerang-Selatan-Positif-Buta-Hukum-) , diakses 13 Mei 2013

